KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAKIP

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

TA 2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat-Nya sehingga penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II, Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2022 ini telah mengacu pada amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Laporan Kinerja ini menyajikan kapasitas organisasi dalam mendukung pencapaian kinerja, capaian kinerja organisasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, serta permasalahan dan tindak lanjut terkait kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2022.

LAKIP Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II ini diharapkan menjadi alat kendali dan penilaian kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel di lingkungan Kementerian PUPR.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama dan dukungan seluruh jajaran di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II yang telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya agar terselesaikannya laporan kinerja ini.

Manokwari, 12 Januari 2023
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II

Ir.Yance Pabisa, M.Tech
NIP 19650412 199703 1 009

RINGKASAN EKSEKUTIF

Provinsi Papua Barat berada di bawah naungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II yang memiliki wilayah administratif di 13 kabupaten/kota. LAKIP ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagaimana yang direvisi pada bulan Desember 2022 dan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Provinsi Papua tahun 2022. Dalam Rangka pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II didukung dengan struktur organisasi yang terdiri dari Kepala Balai; Kasubag TU; Kepala Seksi Wilayah I dan Kepala Seksi Wilayah II; Kepala Satuan Kerja; Pejabat Pembuat Komitmen; Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran; Bendahara Pengeluaran; Kaur Teknik; Kaur Data & Administrasi dan Unit UAKPA & UAKPB.

Struktur organisasi diisi dengan SDM di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat berjumlah 49 orang dengan rincian:

1. PNS 21 orang
2. Non PNS 17 orang
3. Konsultan Individu/ Tenaga Ahli 11 orang

Wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II meliputi 13 Kabupaten /Kota (12 Kabupaten dan 1 Kota) di Provinsi Papua Barat. Wilayah tersebut antara lain Kabupaten Manokwari (sebagai ibukota provinsi), Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fak- Fak, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

Secara umum, capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II mendapat alokasi anggaran sesuai DIPA terakhir sebesar **Rp. 4.840.931.000.** Adapun realisasi keuangan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 4.667.907** dengan persentase realisasi keuangan sebesar **96,43%** sedangkan realisasi fisik mencapai **100%.** Capaian kinerja Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat mendapat alokasi anggaran sesuai DIPA terakhir sebesar **Rp. 105,728,012,000**. Adapun realisasi keuangan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 104.447.962.000** dengan persentase realisasi Keuangan sebesar **98,65%,** sedangkan

realisasi fisik mencapai **94,41%.**

Realisasi penggunaan DIPA Anggaran tersebut telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kinerja maupun Renstra 2020-2024 dan visi yang tertuang dalam Laporan Akhir Kinerja Pemerintah, seperti disajikan dalam table berikut.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Program Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman					
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan	5 Laporan	5 Laporan	100%
		2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	1338 Unit	1337 Unit	99,92%
		3. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	100%
		4. Jumlah Rumah Susun yang dibangun	102 Unit	102 Unit	100%
		5. Jumlah Rumah khusus yang dibangun	30 Unit	30 Unit	100%
		6. Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	- Unit	- Unit	-
		7. Jumlah Rumah MBR yang mendapat Faslitas layanan bantuan PSU	50 Unit	`50 Unit	100%
Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan					
2	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2 Layanan	2 Layanan	100%
		2. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	2 Layanan	2 Layanan	100%
		3. Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layanan	2 Layanan	100%

Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II melalui Satker BP2P Papua II dan Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan sebanyak 5 laporan;
2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah 1337 unit;
3. Jumlah Rumah Susun dibangun 88 unit;
4. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara 1 tower;
5. Jumlah Rumah Khusus dibangun 30 unit;
6. Jumlah rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU sebanyak 50 unit.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR GAMBAR vi
DAFTAR TABEL vii
BAB 1 PENDAHULUAN 8
1.1 LATAR BELAKANG 8
1.2 TUGAS DAN FUNGSI 9
1.2.1 Tugas 9
1.2.2 Fungsi 9
1.3 STRUKTUR BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II 10
1.4 ISU STRATEGIS 11
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA 12
2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS 12
2.2 PERJANJIAN KINERJA 13
2.3 METODE PENGUKURAN 15
2.4 TARGET TAHUN BERJALAN MENURUT RENSTRA 15
BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI 17
3.1 SUMBER DAYA MANUSIA 17
3.2 SARANA DAN PRASARANA 21
3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN 21
BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA 24
4.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 24
4.2 PERBANDINGAN KINERJA ORGANISASI 28
4.3 REALISASI ANGGARAN 28
4.4 ANALISIS KINERJA ORGANISASI 31
BAB 5 PENUTUP 33
5.1 PERMASALAHAN 33
A. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II 33
B. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat 33
5.2 LANGKAH KE DEPAN 34
A. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II 34
B. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat 35

LAMPIRAN 36
DOKUMENTASI KEGIATAN 37
DOKUMENTASI KEGIATAN 38
DOKUMENTASI KEGIATAN 39
DOKUMENTASI KEGIATAN 40
DOKUMENTASI KEGIATAN 41
DOKUMENTASI KEGIATAN 42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II..... 11
Gambar 3.1 Persentase SDM Balai Pelaksana Perumahan Papua II berdasarkan Status Pegawai 17
Gambar 3.2 Persentase SDM Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Papua II berdasarkan Jenjang Pendidikan..... 18
Gambar 4.1 Kurva S Keuangan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II TA 2022 ... 29
Gambar 4.2 Kurva S Keuangan Satker Penyedian Perumahan Papua Barat TA 2022……30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II 14
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2022 15
Tabel 3.1 Total Sumber Daya Manusia di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II 17
Tabel 3.2 Daftar Pegawai Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Papua II 18
Tabel 3.3 Daftar Tenaga Ahli Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II 20
Tabel 3.4 Sarana dan Prasarana Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II TA 2022. 21
Tabel 3.5 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Akhir Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II TA 2022 22
Tabel 4.1 Realisasi Berdasarkan Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II TA. 2022.....24
Tabel 4.2 Capaian Kinerja Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II TA 2022..25
Tabel 4.3 Capaian Kinerja Satker Penyediaan Perumahan Papua Barat TA 2022.....26
Tabel 4.4 Perbandingan Capaian Kinerja setiap Tahun Anggaran terhadap Renstra 2020-2024 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II.....28
Tabel 4.5 Realisasi Anggaran Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2022.....29
Tabel 4.6 Realisasi Anggaran Kegiatan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Papua Barat TA 2022.....30
Tabel 4.7 Tabel.4.7 Sebaran Alokasi BSPS TA. 2022.....31

PENDAHULUAN

BAB I

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II disusun sebagai wujud pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Peenyediaan Perumahan Papua II berdasarkan dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 2020 – 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II tahun 2022 antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Permen PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan mengenai visi dan misi Kementerian PUPR, capaian Kinerja tahun ini, dan capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan target kinerja lima tahunan yang telah direncanakan, serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan

programnya.

Pada akhir tahun 2022 Balai Pelakasana Penyediaan Perumahan Papua II mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp.4.840.931.000** dan **Rp. 45,544,005,000** melalui Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat untuk membantu Direktorat Penyediaan Perumahan mewujudkan ***"Peningkatan Akses Masyarakat Melalui Penyediaan Rumah Layak Huni Secara Kolaboratif".*** Hal tersebut didukung dengan adanya Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Nomor: 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada bagian keempat. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II mempunyai garis koordinasi dengan Kementerian PUPR dalam hal ini Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan sebagai atasan dan para Direktur di Ditjen Penyediaan Perumahan sebagai atasan langsung.

1.2.1 Tugas

Tugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024. Tugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II secara umum antara lain;

1. Menyelenggarakan Program Perumahan dan Kawasan Perumahan dengan menyediakan Akses Rumah Layak Huni yang bertujuan untuk Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni
2. Menyelenggarakan Program Dukungan Manajemen Perumahan yang bertujuan untuk Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan.

1.2.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II menyelenggarakan fungsi, diantaranya yaitu :

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
2. Penyusunan rencana teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
3. Pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
6. Pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
7. Koordinasi dan dukungan penanggulangan pasca bencana;
8. Koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset; dan
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

1.3 STRUKTUR BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

Sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II dimana dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dibantu oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat maka diperlukan perumusan struktur organisasi yang dapat dilihat pada gambar berikut:

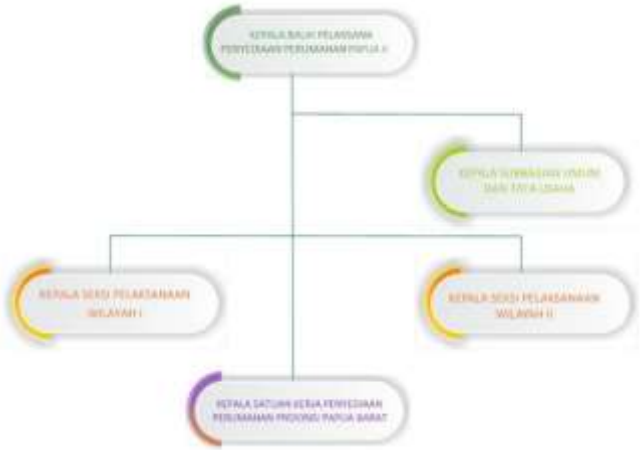

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II

1.4 ISU STRATEGIS

Wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II adalah pada wilayah Provinsi Papua Barat yang terdiri dari 13 Kabupaten / Kota (12 Kabupaten dan 1 Kota). Wilayah tersebut adalah Kabupaten Manokwari (sebagai ibukota provinsi), Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fak- Fak, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak.

Isu strategis yang dihadapi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II adalah sebagai berikut

1. Meningkatnya pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama, data dan informasi serta evaluasi kinerja penyediaan perumahan Provinsi Papua Barat;
2. Tingginya angka *backlog* di Indonesia berdasarkan konsep kepemilikan. *Backlog* perumahan pada tahun 2014 sebesar 13,5 juta unit *(sumber: BPS dan Bappenas).* Berdasarkan konsep penghunian, *backlog* Perumahan sebesar 7,6 juta unit *(sumber: Perpres No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019).*
3. Tingginya jumlah keluarga yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Kawasan Kumuh pada masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan daerah 3T (pulau terluar, terpencil dan tertinggal) dan atau kawasan cagar budaya;
4. Ketersediaan lahan baik itu perkotaan maupun di daerah yang didominasi oleh Hak Ulayat (Hak Adat);
5. Basis Data Perumahan di Provinsi Papua Barat yang kurang memadai;
6. Kurangnya kepedulian Pemerintah Daerah dalam menyusun RP3KP;
7. Serat Terima Aset yang belum optimal;
8. Alokasi dana yang diberikan sangat minim tidak sebanding dengan unit organisasi yang lain, sementara usulan usulan dari kabupaten / kota sangat banyak.

RENCANA KINERJA

BAB II

BAB 2
PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENCANA STRATEGIS

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, perencanaan strategis yang disusun oleh Kementerian atau Lembaga selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Turunan dari rencana strategis dan insfrastruktur dasar dan hunian yang layak dalam rangka rencana kinerja adalah penetapan kinerja yang merefleksikan kinerja yang sesuai dengan perencanaan anggaran. Pelaksanaan program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II merupakan aksi nyata dari berbagai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung program atau kegiatan Kabinet Kerja. Berbagai perencanaan yang telah ditetapkan dalam sebuah dokumen, disusun sedemikian rupa sehingga memiliki hubungan vertikal yang mencerminkan gambaran pelaksanaan kegiatan Unit Organisasi yang melaksanakannya.

Perencanaan kinerja tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR adalah ***"Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Hunian Layak melalui Penyediaan Rumah Layak Huni secara Kolaboratif".*** Guna mendukung kebijakan tersebut, disusun 3 (tiga) strategi sebagai langkah pendekatan pencapaian target Renstra, yaitu:

1. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah (PSR);
2. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah;
3. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif.

Target kinerja yang hendak dicapai oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua

II selama kurun waktu 5 tahun, mulai tahun 2020 hingga tahun 2024, yaitu berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan rumah layak huni melalui:

1. Pembangunan Rumah Susun 956 unit,
2. Pembangunan Rumah Khusus 1.085 unit;
3. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 17.260 unit;
4. Bantuan PSU Rumah Umum 3.174 unit

Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyediaan rumah baru layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai serta meningkatnya kepastian hukum dalam bermukim serta peningkatan kualitas perumahan. Penerapkan prinsip-prinsip pembangungan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan pembangunan perumahan dapat berjalan secara optimal sehingga pemenuhan hunian yang layak sebagai hak dasar rakyat dapat lebih terjamin guna mewujudkan masyarakat yang lebih berjati diri, mandiri dan produktif.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen yang dinyatakan oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan untuk 1 Tahun Anggaran dalam suatu pernyataan tertulis demi melaksanakan amanat yang terdapat pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Adapun tujuan umum penetapan kinerja yaitu: (i) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberiamanah; (ii) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (iii) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (iv) sebagai dasar pemberian penghargaan dan atau sanksi (*reward and punishment*).

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman			
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan	5 Laporan
		2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan	1338 Unit
		3. Kualitas Rumah Swadaya	
		4. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	1 Unit
		5. Jumlah Rumah Susun yang dibangun	102 Unit
		6. Jumlah Rumah khusus yang dibangun	30 Unit
		7. Jumlah Rumah MBR yang mendapat Faslitas layanan bantuan PSU	50 Unit
Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan			
2	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2 Layanan
		2. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	2 Layanan
		3. Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layanan

Sumber: Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2022

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II yang telah disepakati sesuai dengan pagu anggaran awal (per 17 November 2021) yang di alokasikan dalam rangka menunjang kegiatan pada **Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2022 adalah sebesar Rp.5,546,442,000** dan pada **Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Papua Barat sebesar Rp.45,544,005,000**. Namun sejalan dengan dinamika perubahan anggaran, maka pagu ini mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali pada DIPA Balai dan 5 (lima) kali pada DIPA Satuan Kerja, beberapa kali perubahan terdapat pada target pelaksanaan program penyediaan perumahan antara lain: kegiatan sinkronisasi; kegiatan verifikasi dan monev; kegiatan administrasi Balai; kegiatan pengadaan barang; kegiatan Zona Integritas; kegiatan SPIP dan MR; kegiatan Pemberdayaan Perumahan Swadaya; kegiatan Penyediaan Rumah Khusus; kegiatan Penyediaan Rumah Susun; kegiatan fasilitasi PSU bagi rumah MBR; serta penanganan Pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, pagu anggaran akhir (per 08 Desember 2022) **Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II adalah sebesar Rp. 4.840.931.000** dan pagu aggaran (per 22 Desember 2022) **Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 105.728.012.000.**

2.3 METODE PENGUKURAN

Metode pengukuran Kegiatan merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran program yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Pengukuran dilakukan dengan memfokuskan indikator kinerja yang dimiliki oleh Unit Kerja Direktorat Jenderal Perumahan, dalam hal ini Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II seperti Program Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman dan Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan. Indikator Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II periode tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2022

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Program Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman	1. Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan 2. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni Rumah Swadaya 3. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni Rumah Susun 4. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Rumah Susun 5. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni Rumah Khusus 6. Jumlah Rumah MBR yang mendapatkan bantuan PSU
Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	1. Jumlah Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal 2. Jumlah Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Satker 3. Jumlah Pemenuhan Layanan Perkantoran

Sumber: Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2022

2.4 TARGET TAHUN BERJALAN MENURUT RENSTRA

Renstra RPJMN 2020 - 2024 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II dibuat berdasarkan kondisi nyata di daerah yang sangat membutuhkan rumah layak huni dan meningkatkan taraf hidup yang layak dengan mempertimbangkan kearifan lokal daerah setempat berlandaskan visi Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Target Pembangunan Perumahan Tahun 2022 Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II antara lain:

1. Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan sebanyak 4 (empat) dokumen;

2. Pemberdayaan Rumah Swadaya sebanyak 2.260 unit;
3. Penyediaan Rumah Khusus sebanyak 240 unit:
4. Penyediaan Rumah Susun sebanyak 244 unit.
5. Penyediaan PSU Bagi rumah MBR sebanyak 688 unit.

KAPASITAS ORGANISASI

BAB III

BAB 3
KAPASITAS ORGANISASI

3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Adapun komposisi SDM Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II berjumlah 49 orang dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 15 orang dan laki-laki berjumlah 34 orang. Pada jenjang pendidikan SDM Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II sebagai berikut :

Tabel 3.1 Total Sumber Daya Manusia di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II

STATUS PEGAWAI	JENJANG PENDIDIKAN				TOTAL
	SLTA	D3	S1	S2	
PNS	-	-	18	3	**21**
NON PNS	4	2	9	2	**17**
KI	-	-	10	1	**11**
TOTAL	**4**	**2**	**27**	**6**	**49**

Sumber : Data Kepegawaian Balai P2P Papua II tahun 2022

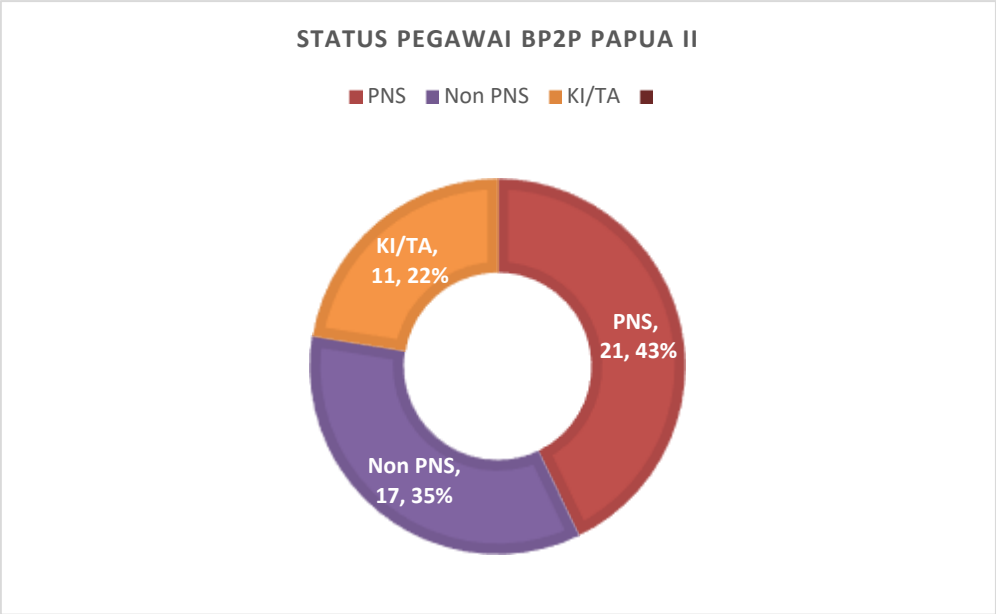

Gambar 3.1 Persentase SDM Balai Pelaksana Perumahan Papua II berdasarkan Status Pegawai

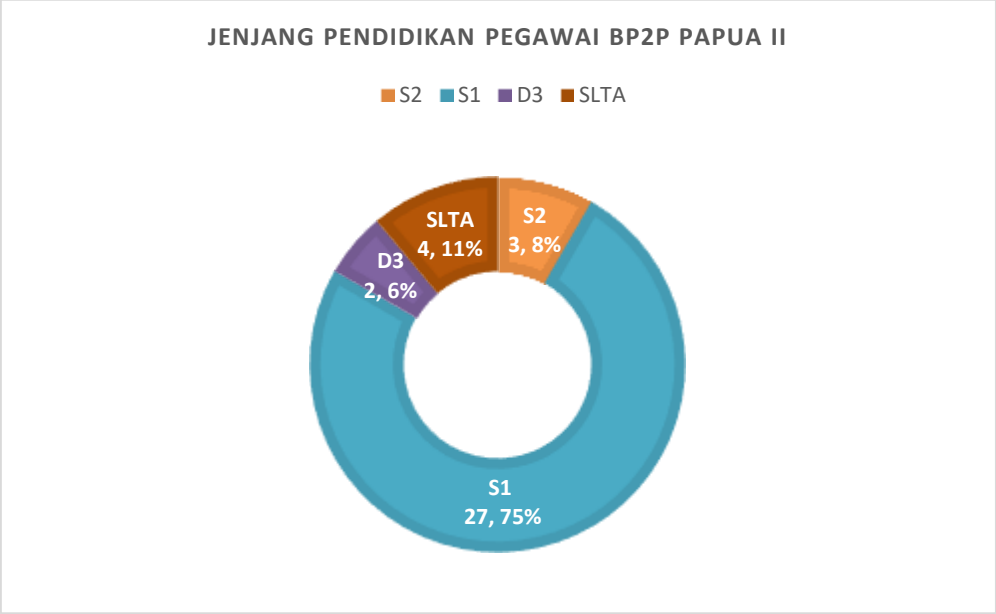

Gambar 3.2 Persentase SDM Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Papua II berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 3.2 Daftar Pegawai Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Papua II

NO	NAMA	NIP/NRP	JABATAN	STATUS PEGAWAI	PENDIDIKAN
1	Ir.Yance Pabisa, M.Tech	196912181996031005	Kepala Balai P2P Papua II	PNS Pusat	Teknik
2	Toga Mulia Pangapoi, S.Sos	197309192008121001	KasubbagTU	PNS Pusat	Non Teknik
3	P. M. Desyarmeda Killian, ST., M.Si	19791227 200605 2 001	Kepala Seksi Wilayah I	PNS Pusat	Teknik
4	Ferry Moya, ST	19821029 201412 1 001	Kepala Seksi Wilayah II / PPK BP2P Papua II	PNS Pusat	Teknik
5	Michkael Nicolas Demena, ST,MT	198008132003121004	Kepala Satuan Kerja Prov. Papua Barat	PNS Pusat	Teknik
6	Issa Agung Cristya Wibawa, ST	19821012 201412 1 001	PPK Rumah Susun dan Khusus	PNS Pusat	Teknik
7	Markus Desla, S.Kom	19871231 201412 1 001	PPK Rumah Swadaya dan RUK	PNS Pusat	Non Teknik
8	Enggelina Snanfi, ST	19821020 201412 2 001	PPSPM	PNS Daerah	Teknik
9	Trifosa Marpaung, ST	19871030 201412 1 001	Bendahara Pengeluaran	PNS Daerah	Teknik
10	Ahmad Rithauddin Abbas, ST	198004052010041001	Staf Pengelola	PNS Pusat	Teknik

11	Yuspin, ST	198307032011042001	Staf Pengelola	PNS Pusat	Teknik
12	Amus Yanto Ijie, ST	19810108 2008011009	Staf Pengelola	PNS Daerah	Teknik
13	Rustamaji, SH	19741208 2004121002	Staf Pengelola	PNS Daerah	Non Teknik
14	Yosia Ronald, SE	19891113 2014121001	Staf Pengelola	PNS Daerah	Non Teknik
15	Wahyu Setyawan, S.Ars	199302032020121008	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan- Ahli Pratama	PNS Pusat	Teknik
16	Ady Dwi Nugroho, S.Ars	199304162020121003	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan- Ahli Pratama	PNS Pusat	Teknik
17	Rifka Assifa Prasetyacita, S.Ars	199708042020122011	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan- Ahli Pratama	PNS Pusat	Teknik
18	Novenantia Christha Maharani, S.Ars	199707122020122011	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan- Ahli Pratama	PNS Pusat	Teknik
19	Amalina Budiati, ST	199501052020122007	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan- Ahli Pratama	PNS Pusat	Teknik
20	Alikha Idea Nuansa Wicaksono, S.Ars	199611162020122004	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan- Ahli Pratama	PNS Pusat	Teknik
21	Aisyah Nur Hidayati, ST	199306012020122004	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan- Ahli Pratama	PNS Pusat	Teknik
22	Adrian Yudhantoro, ST	F04121993092018001	Pelaksana Teknik	Non PNS	Teknik
23	Andarias A. Boseren, SP	F11081987092018001	Penyusun Monev dan Pelaporan	Non PNS	Non Teknik
24	Dance Christian Nepa Bureni, SE	F28121979092018001	Penelaah Keuangan	Non PNS	Non Teknik
25	Daniel Dany, ST	F10061983092018001	Pelaksana Teknik	Non PNS	Teknik
26	Devi Setyaningtyas. R, S.Sos., M.Si	F12041980092018001	Penelaah BMN	Non PNS	Non Teknik
27	Leonora O. Mambrasar, S.I.P., M.Si	F27121979092018001	Penelaah Pengadaan Barang dan Jasa	Non PNS	Non Teknik
28	Natalia Howay, SE	F24121992092018001	Penelaah Keuangan	Non PNS	Non Teknik
29	Obet Yohan M. Kmur, ST	F18071982092018001	Pelaksana Teknik	Non PNS	Teknik
30	Omegah Nian Hutabalian, S.TP	F22091993092018001	Penelaah Keuangan	Non PNS	Non Teknik

31	Rahmad Hidayat Killian, ST	F19021990092018001	Pelaksana Teknik	Non PNS	Teknik
32	Rahmawati Wahid, A.Md	F10021991092018001	Penata BMN	Non PNS	Non Teknik
33	Ruben Ruamba, ST	F24071978092018001	Pelaksana Teknik	Non PNS	Teknik
34	Sitti Mardiah Rahakbauw, A.Md.Kom	F16101989092018001	Penata Keuangan	Non PNS	Teknik
35	Yuliana Thinike Koirewoa	F12081988092018001	Pramubakti	Non PNS	Non Teknik
36	Dolfina Watofa	F11121966092018001	Pramubakti	Non PNS	Non Teknik
37	Agustinus Mauw	F27081978092018001	Petugas Keamanan	Non PNS	Non Teknik
38	Syarif Hamdani	F31121979092018001	Pengemudi	Non PNS	Non Teknik

Sumber : Data Kepegawaian Balai P2P Papua II,2022

Tabel 3.3 Daftar Tenaga Ahli Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II

NO	NAMA	JABATAN
1	Rino Razali, S.IP	Tenaga Ahli Pemberdayaan PPK Rumah Swadaya
2	Sutrisno Dalwis Susanto Kurama, ST	Konsultan Individual PPK Rumah Swadaya
3	Ririn Engie Valista Serimbing, S.Ars	Asisten Tenaga Ahli Kontruksi PPK Rumah Swadaya
4	Budiono	Tenaga Ahli Manajemen PPK Rumah Swadaya
5	Mirdan Umbu, ST	Tenaga Ahli Kontruksi PPK Rumah Swadaya
6	Ray Damai Samuel Siregar, ST	Tenaga Ahli Konstruksi
7	Bert Erwin Sembor, ST	Tenaga Ahli Kontruksi
8	Zainudin MZ. Zainal, S.Kom	Tenaga Ahli Kelembagaan
9	Sugiarto Massolo,ST	Tenaga Ahli Pendataan
10	Kukuh Sungkawa,ST,MT,MP	Tenaga Ahli Perencanaan Perumahan
11	Muh. Fachrul Bachmid, ST	Konsultan Individu Sinkronisasi Program

Sumber : Data Kepegawaian Balai P2P Papua II,2022

3.2 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas pendukung untuk meningkatkan kinerja pegawai dan untuk menciptakan pelaksanaan kegiatan perlu ditunjang fasilitas yang memadai sebagai bagian dari proses meningkatkan kinerja atau mengerjakan seluruh kegiatan dengan tepat. Berikut daftar sarana dan prasarana di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II tahun anggaran 2022:

Tabel 3.4 Sarana dan Prasarana Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II TA 2022

No.	Kode Barang	Uraian	Kuantitas	Satuan	Nilai (Rp)
1	132111	Peralatan dan Mesin	20	-	99.225.039
2	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	7	buah	5.460.000
3	3.05.02.01.003	Kursi Besi / Metal	7	buah	9.800.000
4	3.05.02.01.008	Meja Rapat	1	buah	6.740.000
5	3.06.01.05.047	Kamera Udara	1	buah	17.889.791
6	3.10.01.02.001	PC Unit	1	buah	8.800.000
7	3.10.01.02.002	Laptop	3	buah	50.535.248
Total					99.225.039

Sumber: Laporan BMN Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II TA.2022

Walaupun dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II tidak mengurangi semangat untuk tetap mengerjakan segala aktifitas perkantoran baik di dalam kantor maupun di luar kantor sehingga segala tugas yang diembankan tetap dapat dijalankan dengan baik dan lancar.

3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA No. SP DIPA-033.07.1.420161/2022 dengan alokasi pagu anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II sebesar **Rp. 5.546.442.000**. Selama TA 2022 telah mengalami revisi sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

Revisi I: : Adanya pengurangan anggaran pada kegiatan Sinkronisasi Program Pusat - Daerah, Pembinaan Penyelenggaraan PKP, Verifikasi dan Monev, Dukungan Pelaksanaan Pembangunan, Administrasi Kegiatan Balai, Pengadaan Pengolah Data dan penambahan anggaran pada Penjaringan Usulan dan Verifikasi Lokasi Bantuan PSU Perumahan bagi MBR TA 2023, serta Koordinasi Pendataan PSR, Perencanaan Pemeliharaan Rumah Susun, sehingga nilai pagu anggaran Balai

Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II setelah Revisi ke 01 tanggal 25 April 2022 menjadi sebesar **Rp. 5.291.776.000.**

Revisi II : Adanya pengurangan anggaran pada pada Administrasi Kegiatan Balai dan penambahan anggaran untuk Pengadaan Peralatan Mendukung BIM, sehingga nilai pagu anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II setelah Revisi ke 02 Tanggal 21 Agustus 2022 menjadi sebesar **Rp. 5.085.972.000**

Revisi III : Adanya pengurangan anggaran pada Sinkronisasi Program Pusat – Daerah, Pembinaan Penyelenggaraan PKP, Dukungan Pelaksanaan Pembangunan, Administrasi Kegiatan Balai dan penambahan anggaran pada Verifikasi dan Monev, Penjaringan Usulan dan Verifikasi Lokasi Bantuan PSU Perumahan bagi MBR TA 2023, serta Koordinasi Pendataan PSR, Perencanaan Pemeliharaan Rumah Susun, Pembangunan Zona Integritas, Penyelenggaraan Penyusunan SPIP dan Manajemen Resiko, sehingga nilai pagu anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II setelah Revisi ke-03 Tanggal 02 November 2022 menjadi sebesar **Rp. 4.905.101.000.**

Revisi IV : Karena adanya pengurangan anggaran pada kegiatan Dukungan Pelaksanaan Pembangunan, Administrasi Kegiatan Balai dan penambahan anggaran untuk percepatan serah terima aset sehingga nilai pagu anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan setelah Revisi ke-04 Tanggal 8 Desember 2022 menjadi sebesar **Rp. 4.840.931.000.**

Tabel 3.5 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Akhir Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II TA 2022

No.	Kode	Program/Kegiatan/Output	Vol.	Satuan	Pagu (Rp Ribu)
1	**033.07.IA**	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**			**1.694.128**
	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni			1.694.128
	4978.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1	Rekomendasi Kebijakan	1.300.128
	4978.CDB	OM Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	1	Unit	394.00
2	**033.07.WA**	**Program Dukungan Manajemen**			**3.146.803**

	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan			3.146.803
	5578.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	Layanan	2.705.551
	5578.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Unit	441.252
TOTAL					**4.840.931**

Sumber: Revisi DIPA ke-04 TA 2022 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV

BAB 4
AKUNTABILITAS KINERJA

4.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja pada yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II memiliki dampak pengaruh langsung terhadap isu strategis dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Papua Barat.

Program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II serta Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat dalam menghadapi isu strategis dan menurunkan tingginya angka *backlog* di Provinsi Papua Barat dilandaskan dengan visi Kementerian PUPR. Realisasi indikator BP2P Papua II telah dapat memenuhi target yang direncanakan sesuai PK 2022 maupun Renstra 2020-2024,diantaranya:

Table 4.1 Realisasi Berdasarkan Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II TA. 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Program Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman					
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan	5 Laporan	5 Laporan	100%
		2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	1338 Unit	1337 Unit	99,92%
		3. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	100%
		4. Jumlah Rumah Susun yang dibangun	102 Unit	102 Unit	100%
		5. Jumlah Rumah khusus yang dibangun	30 Unit	30 Unit	100%
		6. Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	- Unit	- Unit	-
		7. Jumlah Rumah MBR yang mendapat Faslitas layanan bantuan PSU	50 Unit	`50 Unit	100%
Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan					
2	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	4. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2 Layanan	2 Layanan	100%
		5. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	2 Layanan	2 Layanan	100%
		6. Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layanan	2 Layanan	100%

Dalam antusias *stakeholder* serta masyarakat penerima bantuan dalam mendukung pembangunan perumahan menjadi hasil nyata dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Table 4.2 Capaian Kinerja Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II TA 2022

No	Kode	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Target Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keu (%)	Fisik (%)
1	**4978**	**Penyediaan Akses Rumah Layak Huni**			**1.694.128**	**1.649.624**	**97,37**	**100,00**
2	**4978.ABF**	**Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana**		Rekomendasi Kebijakan/Kajian	**1.300.128**	**1.267.411**	**97,48**	**100,00**
3	**4978.ABF.009**	**Strategi dan Program Prioritas Tahunan Bidang Perumahan**	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	**1.080.128**	**1.047.602**	**96,99**	**100,00**
4	4978.ABF.009.101.A	Sinkronisasi Program Pusat - Daerah	1	Dokumen	**181.251**	**179.711**	**99,15**	**100,00**
5	4978.ABF.009.101.B	Pembinaan Penyelenggaraan PKP	1	Dokumen	**473.345**	**455.836**	**96,30**	**100,00**
6	4978.ABF.009.101.C	Verifikasi dan Monev	1	Dokumen	**166.251**	**163.968**	**98,63**	**100,00**
7	4978.ABF.009.101.D	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Dokumen	**259.281**	**248.088**	**95,68**	**100,00**
8	**4978.ABF.021**	**Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial**	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	**220.000**	**219.809**	**99,91**	**100,00**
9	4978.ABF.021.101.A	Penjaringan Usulan dan Verifikasi Lokasi Bantuan PSU Perumahan bagi MBR TA 2023, serta Koordinasi Pendataan PSR	1	Dokumen	**220.000**	**219.809**	**99,91**	**100,00**
10	**4978.CDB**	**OM Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman**		unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR	**394.000**	**382.213**	**97,01**	**100,00**
11	**4978.CDB.004**	**Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama**	0.0001	unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR	**394.000**	**382.213**	**97,01**	**100,00**
12	4978.CDB.004.100.A	Perencanaan Pemeliharaan Rumah Susun	1	Dokumen	**394.000**	**382.213**	**97,01**	**100,00**
13	**5578**	**Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan**			**3.146.803**	**3.018.283**	**95,92**	**100,00**
14	**5578.EBA**	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**		Layanan/Laporan/Dokumen	**2.705.551**	**2.594.549**	**95,90**	**100,00**
15	**5578.EBA.962**	**Layanan Umum**	1	Layanan/Laporan/Dokumen	**797.884**	**730.313**	**91,53**	**100,00**
16	5578.EBA.962.101.A	Dukungan Pelaksanaan Pembangunan	1	Layanan	**501.884**	**495.189**	**98,67**	**100,00**
17	5578.EBA.962.101.B	PERCEPATAN SERAH TERIMA ASET	1	Dokumen	**96.000**	**93.065**	**96,94**	**100,00**
18	5578.EBA.962.102.A	Pembangunan Zona Integritas	1	Dokumen	**151.910**	**100.186**	**65,95**	**100,00**
19	5578.EBA.962.102.B	Penyelenggaraan Penyusunan SPIP dan Manajemen Resiko	1	Dokumen	**48.090**	**41.874**	**87,07**	**100,00**
20	**5578.EBA.994**	**Layanan Perkantoran**	1	Layanan/Laporan/Dokumen	**1.907.667**	**1.864.235**	**97,72**	**100,00**
21	5578.EBA.994.002.A	Administrasi Kegiatan Balai	1	Layanan	**1.907.667**	**1.864.235**	**97,72**	**100,00**
22	**5578.EBB**	**Layanan Sarana dan Prasarana Internal**		Unit/m2/Paket	**441.252**	**423.734**	**96,03**	**100,00**
23	**5578.EBB.951**	**Layanan Sarana Internal**	1	Unit/m2/Paket	**441.252**	**423.734**	**96,03**	**100,00**
24	5578.EBB.951.101.A	Pengadaan Pengolah Data	1	Layanan	**91.252**	**91.234**	**99,98**	**100,00**
25	5578.EBB.951.101.B	Pengadaan Peralatan Mendukung BIM	1	Layanan	**350.000**	**332.500**	**95,00**	**100,00**
TOTAL					**4.840.931**	**4.667.907**	**96,43**	**100,00**

Sumber: e-monitoring.pu.go.id

Table 4.3 Capaian Kinerja Satker Penyediaan Perumahan Papua Barat TA 2022

No	Kode	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Target Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keu (%)	Fisik (%)
1	**4978**	**Penyediaan Akses Rumah Layak Huni**			**104.848.079**	**103.407.992**	**98,66**	**99,9**
2	**4978.ABF**	**Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana**		Rekomendasi Kebijakan/Kajian	**235.039**	**233.407**	**99,31**	**100,0**
3	**4978.ABF.009**	**Strategi dan Program Prioritas Tahunan Bidang Perumahan**	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	**235.039**	**233.407**	**99,31**	**100,0**
4	**4978.ABF.009.101.A**	Verifikasi dan Monev	1	Laporan	**235.039**	**233.407**	**99,31**	**100,0**
5	**4978.CBB**	**Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman**		unit/Hektar/KK/ Liter/detik/SR	**9.263.528**	**8.739.983**	**94,35**	**100,0**
6	**4978.CBB.010**	**Rumah Susun Asrama Pendidikan (Anggaran Pendidikan)**	14	unit/Hektar/KK/ Liter/detik/SR	**9.263.528**	**8.739.983**	**94,35**	**100,0**
7	**4978.CBB.010.100.A**	Perencanaan Pembangunan Rumah Susun	1	Paket	**200.000**	**195.870**	**97,94**	**100,0**
8	**4978.CBB.010.101.A**	Pembangunan Rumah Susun	14	Unit	**7.667.924**	**7.167.924**	**93,48**	**100,0**
9	**4978.CBB.010.102.A**	Managemen Konstruksi Rumah Susun	1	Paket	**439.704**	**431.322**	**98,09**	**100,0**
10	**4978.CBB.010.102.B**	Pengawasan dan Pengendalian Rumah Susun	1	Laporan	**590.000**	**588.791**	**99,80**	**100,0**
11	**4978.CBB.010.103.A**	Meubelair Rumah Susun	1	Paket	**365.900**	**356.076**	**97,32**	**100,0**
12	**4978.CDB**	**OM Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman**		unit/Hektar/KK/ Liter/detik/SR	**295.000**	**293.575**	**99,52**	**100,0**
13	**4978.CDB.004**	**Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama**	1	unit/Hektar/KK/ Liter/detik/SR	**295.000**	**293.575**	**99,52**	**100,0**
14	**4978.CDB.004.100.A**	Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun	1	Paket	**259.000**	**257.575**	**99,45**	**100,0**
15	**4978.CDB.004.100.B**	Supervisi Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun	1	Paket	**36.000**	**36.000**	**100,00**	**100,0**
16	**4978.FAD**	**Perencanaan dan Penganggaran**		Layanan/Dokumen	**20.000**	**19.948**	**99,74**	**100,0**
17	**4978.FAD.004**	**Perencanaan Teknik, Program dan Anggaran Pembangunan Rumah Khusus**	1	Layanan/Dokumen	**20.000**	**19.948**	**99,74**	**100,0**
18	**4978.FAD.004.105.A**	Vertek Pembangunan Rumah Khusus	1	Laporan	**20.000**	**19.948**	**99,74**	**100,0**
19	**4978.FAG**	**Pengawasan Pembangunan**		Laporan	**6.501.035**	**6.382.377**	**98,17**	**100,0**
20	**4978.FAG.002**	**Pengawasan dan Pengendalian Bantuan dan Kemudahan Perumahan Swadaya BSPS (PEN)**	1	Laporan	**3.727.755**	**3.612.266**	**96,90**	**100,0**
21	**4978.FAG.002.100.A**	Pembinaan Teknis Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	1	Laporan	**1.613.430**	**1.551.884**	**96,19**	**100,0**
22	**4978.FAG.002.100.B**	Pembinaan Teknis Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (NAHP)	1	Laporan	**2.114.325**	**2.060.382**	**97,45**	**100,0**
23	**4978.FAG.003**	**Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Khusus**	1	Laporan	**624.996**	**624.853**	**99,98**	**100,0**
24	**4978.FAG.003.100.A**	Supervisi Pembangunan Rumah Khusus	1	Paket	**327.649**	**327.648**	**100,00**	**100,0**
25	**4978.FAG.003.100.B**	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Khusus	1	Laporan	**278.743**	**278.602**	**99,95**	**100,0**

No	Kode	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Target Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keu (%)	Fisik (%)
26	4978.FAG.003.100.C	Pembayaran PMK 243 Paket Rumah Khusus Tahun 2019	1	Laporan	18.604	18.603	99,99	100,00
27	**4978.FAG.004**	**Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Susun**	1	Laporan	2.148.284	2.145.258	99,86	100,00
28	4978.FAG.004.100.A	Managemen Konstruksi Rumah Susun	4	Paket	1.396.284	1.393.258	99,78	100,00
29	4978.FAG.004.100.B	Pengawasan dan Pengendalian Rumah Susun	1	Laporan	752.000	752.000	100,00	100,00
30	**4978.RBB**	**Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman**		unit/Hektar/KK/ Liter/detik/SR	88.533.477	87.818.702	99,15	99,96
31	**4978.RBB.001**	**PSU Perumahan Bagi MBR**	50	unit/Hektar/KK/ Liter/detik/SR	643.856	505.648	78,53	100,00
32	4978.RBB.001.100.A	Penyusunan DED dan Supervisi Bantuan PSU Perumahan bagi MBR	1	Laporan	110.000	90.050	81,86	100,00
33	4978.RBB.001.100.B	Pembangunan PSU Perumahan bagi MBR	1	Paket	323.910	206.450	63,74	100,00
34	4978.RBB.001.100.C	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan PSU Perumahan bagi MBR	1	Laporan	209.946	209.148	99,62	100,00
35	**4978.RBB.002**	**Rumah Khusus**	30	unit/Hektar/KK/ Liter/detik/SR	8.555.425	7.962.384	93,07	100,00
36	4978.RBB.002.100.A	Pembangunan Rumah Khusus	30	Unit	7.906.802	7.313.762	92,50	100,00
37	4978.RBB.002.100.B	Pembayaran PMK 243 Paket Rumah Khusus Tahun 2019	1	Laporan	648.623	648.622	100,00	100,00
38	**4978.RBB.003**	**Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI**	44	unit/Hektar/KK/ Liter/detik/SR	15.498.197	15.492.927	99,97	100,00
39	4978.RBB.003.100.A	Pembangunan Rumah Susun	44	Unit	15.498.197	15.492.927	99,97	100,00
40	**4978.RBB.004**	**Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja**	44	unit/Hektar/KK/ Liter/detik/SR	13.665.499	13.647.243	99,87	100,00
41	4978.RBB.004.100.A	Pembangunan Rumah Susun	44	Unit	13.665.499	13.647.243	99,87	100,00
42	**4978.RBB.008**	**Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (PEN)**	1338	unit/Hektar/KK/ Liter/detik/SR	50.170.500	50.130.500	100,00	99,92
43	4978.RBB.008.101.A	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (NAHP)	1288	Unit	48.995.500	48.955.500	100,00	99,92
44	4978.RBB.008.101.B	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	50	Unit	1.175.000	1.175.000	100,00	100,00
45	**5578**	**Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan**			879.933	851.168	96,73	100,00
46	**5578.EBA**	**Layanan Dukungan Manajemen Internal**		Layanan/Laporan /Dokumen	720.374	694.306	96,38	100,00
47	**5578.EBA.962**	**Layanan Umum**	1	Layanan/Laporan /Dokumen	261.176	253.209	96,95	100,00
48	5578.EBA.962.101.A	Dukungan Pelaksanaan Pembangunan	1	Laporan	261.176	253.209	96,95	100,00
49	**5578.EBA.994**	**Layanan Perkantoran**	1	Layanan/Laporan /Dokumen	459.198	441.097	96,06	100,00
50	5578.EBA.994.002.A	Administrasi Kegiatan Satker	1	Laporan	459.198	441.097	96,06	100,00
51	**5578.EBB**	**Layanan Sarana dan Prasarana Internal**		Unit/m2/Paket	159.559	156.862	98,31	100,00
52	**5578.EBB.951**	**Layanan Sarana Internal**	1	Unit/m2/Paket	159.559	156.862	98,31	100,00

No	Kode	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Target Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keu (%)	Fisik (%)
53	5578.EBB.951.101.A	Pengadaan Pengolah Data	1	Paket	87.059	84.362	96,90	100,00
54	5578.EBB.951.101.B	Pengadaan Peralatan Mendukung BIM	1	Paket	72.500	72.500	100,00	100,00
TOTAL					105.728.012	104.259.160	98,65	99,96

Sumber: e-monitoring.pu.go.id

4.2 PERBANDINGAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja. Berikut perbandingan capaian kinerja setiap tahun anggaran terhadap Renstra 2020-2024 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II.

Tabel 4.4 Perbandingan Capaian Kinerja setiap Tahun Anggaran terhadap Renstra 2020-2024
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II

No.	Sasaran Kegiatan	Pencapaian Kinerja					Renstra				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	4	4	5	0	0	4	4	4	4	4
2	Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	5.510	1.610	1337	0	0	5.510	2.190	2.260	3.390	3.910
3	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	74	82	30	0	0	74	111	240	240	280
4	Jumlah Rumah susun yang dibangun	0	152	88	0	0	0	152	244	303	257
5	Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	0	50	50	0	0	0	500	688	875	1.111

Sumber : Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II 2020-2024

4.3 REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2022, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan mendapat alokasi anggaran sesuai DIPA terakhir sebesar **Rp.4.840.931.000.** Adapun realisasi keuangan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 4.667.907** dengan persentase realisasi sebesar **96,43%,** sedangkan realisasi fisik mencapai **100%.** Pada Satker Penyediaan Perumahan Papua Barat allokasi anggaran sesuai DIPA terakhir sebesar **Rp. 105.728.012.000,** untuk realisasi keuangan sebesar **104.447.992.00** dengan presentase sebesar **98,66%,** sedangkan realisasi fisik **94,36%.**

Tabel 4.5 Realisasi Anggaran Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2022

NO	Kode	Program/Kegiatan/Output	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keuangan		Fisik		
							RN	RL	RN	RL	Kinerja
1	**IA**	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**			**1.694.128**	**1.649.624**	**100,00**	**97,37**	**100,00**	**100,00**	100,00
1	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni			1.694.128	1.649.624	100,00	97,37	100,00	100,00	100,00
1	ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Rekomendasi Kebijakan/Kajian	1.300.128	1.267.411	100,00	97,48	100,00	100,00	100,00
2	CDB	OM Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		unit/Hektar/KK/Liter /detik/SR	394.000	382.213	100,00	97,01	100,00	100,00	100,00
2	**WA**	**Program Dukungan Manajemen**			**3.146.803**	**3.018.283**	**100,00**	**95,92**	**100,00**	**100,00**	100,00
2	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan			3.146.803	3.018.283	100,00	95,92	100,00	100,00	100,00
3	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/Laporan/Dokumen	2.705.551	2.594.549	100,00	95,90	100,00	100,00	100,00
4	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Unit/m2/Paket	441.252	423.734	100,00	96,03	100,00	100,00	100,00
	TOTAL				**4.840.931**	**4.667.907**	**100,00**	**96,43**	**100,00**	**100,00**	

Sumber : e-monitoring.pu.go.id

Renc. e-Mon	0,00	4,39	11,77	17,98	19,40	30,89	40,63	44,82	48,67	56,36	81,17	100,00
Real. Keu	0,00	4,62	12,22	18,24	19,67	29,55	39,75	43,94	47,97	53,10	66,20	96,43

Gambar 4.1 Kurva S Keuangan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II TA 2022 (Sumber : e-monitoring.pu.go.id)

Table 4.6 Realisasi Anggaran Kegiatan Satker Penyediaan Perumahan Papua Barat TA. 2022

NO	Kode	Program/Kegiatan/Output	Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keuangan		Fisik		
							RN	RL	RN	RL	Kinerja
1	**IA**	**Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**			**104.848.079**	**103.447.992**	**100,00**	**98,66**	**100,00**	**97,36**	97,36
1	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni			104.848.079	103.447.992	100,00	98,66	100,00	97,36	97,36
1	ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Rekomendasi Kebijakan/Kajian	235.039	233.407	100,00	99,31	100,00	100,00	100,00
2	CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR	9.263.528	8.739.983	100,00	94,35	100,00	100,00	100,00
3	CDB	OM Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR	295.000	293.575	100,00	99,52	100,00	100,00	100,00
4	FAD	Perencanaan dan Penganggaran		Layanan/Dokumen	20.000	19.948	100,00	99,74	100,00	100,00	100,00
5	FAG	Pengawasan Pembangunan		Laporan	6.501.035	6.382.377	100,00	98,17	100,00	98,33	98,33
6	RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman		unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR	88.533.477	87.778.702	100,00	99,15	100,00	96,99	96,99
2	**WA**	**Program Dukungan Manajemen**			**879.933**	**851.168**	**100,00**	**96,73**	**100,00**	**100,00**	100,00
2	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan			879.933	851.168	100,00	96,73	100,00	100,00	100,00
7	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/Laporan/Dokumen	720.374	694.306	100,00	96,38	100,00	100,00	100,00
8	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Unit/m2/Paket	159.559	156.862	100,00	98,31	100,00	100,00	100,00
	TOTAL				105.728.012	104.299.160	100,00	98,65	100,00	97,38	

Sumber : e-monitoring.pu.go.id

Renc. e-Mon	0,00	0,05	9,13	16,87	22,15	27,64	33,83	73,93	78,35	82,34	86,29	100,00
Real. Keu	0,00	0,05	9,13	16,87	22,13	27,62	34,37	73,91	78,32	81,85	85,78	98,65

Gambar 4.2 Kurva S Keuangan Satker Penyedian Perumahan Papua Barat TA 2022 (Sumber : e-monitoring.pu.go.id)

4.4 ANALISIS KINERJA ORGANISASI

Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan Tahun Anggaran 2022 telah selesai dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Visi yang tertuang dalam laporan akhir kinerja pemerintah. Dalam menjalankan misi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II telah melaksanakan :

1. **Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan 5 laporan;**

   Laporan yang tersusun terdiri dari perencanaan penyediaan perumahan, layanan sarana dan prasarana internal, layanan dukungan manajemen satker dan layanan perkantoran dengan output diantaranya:

   a. Sinkronisasi Program Pusat-Daerah
   b. Pembinaan Penyelenggaraan PKP
   c. Verifikasi dan Monev Penyelengaaraan Perumahan

2. **Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah 1337 unit;**

   Pada tahun 2022 alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat sebanyak 1.338 unit yang tersebar di 11 Kab/Kota dengan SK Dirjen akhir sebanyak 1337. Penyaluran program BSPS dilaksanakan dalam menangani rumah tidak layak unik terutama pada Kawasan Kemiskinan Ekstrim sebagai dukungan Dalam Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrim (PKE) seperti tabel berikut.

Tabel.4.7 Sebaran Alokasi BSPS TA. 2022

No	Kab /Kota	SK Dirjen	Tahapan	SK PPK
1	Kabupaten Teluk Wondama	40	T-1	40
2	Kabupaten Teluk Bintuni	203	T-1, T II, T III, T IV	203
3	Kabupaten Manokwari Selatan	55	T-I	55
4	Kabupaten Tambraw	40	T-I	40
5	Kabupaten Maybrat	40	T-1	40
6	Kabupaten Sorong	24	T II	24
7	Kabupaten Sorong Selatan	621	T II, T III, T IV	621
8	Kota Sorong	186	T III, T IV	186
9	Kabupaten Manokwari	65	T III, T IV	65
10	Kabupaten Raja Ampat	13	T III, TIV	13
11	Kabupaten Kaimana	50	Reguler	50
Total		**1337**		**1337**

3. **Jumlah Rumah Susun dibangun 88 unit;**

   Program yang dilaksanakan oleh PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus diantaranya :

   a. Pembangunan Rumah Susun Huian ASN/TNI/POLRI yaitu Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Papua Barat,
   b. Pembangunan Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja yaitu Rumah Susun MBR Kabupaten Tambraw.

4. **Jumlah Rumah Susun yang dipelihara 1 tower;**

   Selain kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus juga melaksanakan kegiatan pemeliharaan pada Rumah Susun SPGJ Lahai Roi Kabupaten Manokwari.

5. **Jumlah Rumah Khusus dibangun 30 unit**;

   Program kegiatan Rumah Khusus yaitu Pembangunan Rumah Khusus Sausafor Kabupaten Tambraw

6. **Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU sebanyak 50 unit.**

   Program Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum di Kabupaten Manokwari pada Perumahan Griya Andai.

Permasalahan yang dialami oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Papua Barat yaitu: Konflik sosial yang mempengaruhi jalannya proses pembangunan; kondisi geografis Papua Barat di lokasi pekerjaan yang pada dasarnya pegunungan serta kepulauan; kurangnya tenaga kerja terampil; ketersediaan material non lokal di lokasi pekerjaan; serta pembatasan PPKM yang dilaksanakan Pemerintah guna mengantisipasi penyebaran virus covid-19 sehingga pada jadwal monev dan kegiatan Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan oleh Balai tidak sesuai waktu yang ditetapkan.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II menindaklanjuti setiap permasalahan yang dihadapi di lokasi pekerjaan dengan berkoordinasi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pelaksana, konsultan, dan *stakeholder* lainnya terkait kelancaran pembangunan perumahan di wilayah kerja masing-masing.

PENUTUP

BAB V

BAB 5
PENUTUP

5.1 PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang terdapat di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Papua Barat tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

A. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II

1. Belum adanya kantor tetap dimana balai dan satker masih melakukan sewa kantor berupa rumah tinggal dengan ruangan yang tidak mencukupi secara jumlah unit dan luasan ruangnya.
2. Anggaran yang tersedia dalam DIPA, sebagian besar anggarannya masih terblokir, seperti honorarium pegawai, perjalanan dinas, paket *fullboard meeting*, sewa kendaraan sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan di awal tahun.
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia berupa tenaga non teknis khususnya di bagian keuangan, dimana masih rangkap jabatan pada jabatan Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penguji SPM pada Satker Balai dan Satker Fisik.
4. Terblokirnya anggaran sewa kendaraan roda empat untuk operasional kantor yang menghambat pelaksanaan aktivitas pegawai yang akan melakukan koordinasi dan konsultasi ke pihak eksternal yang dapat dijangkau dengan kendaraan roda empat.
5. Anggaran belum tersedia untuk percepatan pelaksanaan serah terima aset BMN satker dan BMN ex-Bangrum dan pencanangan kawasan Zona Integritas WBK/WBBM.
6. Persyaratan administrasi usulan pembangunan bantuan perumahan belum lengkap, khususnya pada usulan aspirasi anggota dewan sehingga menghambat pada serah terima aset apabila bangunannya akan diserahterimakan ke penerima bantuan.

B. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat

1. Lokasi yang diusulkan untuk bantuan perumahan belum siap bangun sehingga penyedia jasa harus melaksanakan penyiapan lahan terlebih dahulu yang membutuhkan waktu dan biaya.
2. Proses pelelangan di BP2JK memerlukan waktu yang cukup lama sehingga memperpendek waktu pelaksanaan pekerjaan fisik.

3. Anggaran untuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ke lokasi pekerjaan sangat terbatas yang berdampak pada minimnya pemantauan pelaksanaan ke lokasi pekerjaan secara berkala apalagi di lokasi yang terpencil.
4. Lokasi bantuan perumahan khususnya BSPS sangat terpencil dan sulit dijangkau dengan transportasi darat yang membutuhkan biaya yang besar.
5. SK Penetapan Dirjen yang menjadi usulan KL sehingga perlu di verifikasi ulang dan banyak terjadi penggantiaan penerima bantuan sehingga membutuhkan waktu verifikasi yang lama.
6. Jumlah dampingan setiap TFL sangat banyak, serta jarak tiap kelurahan / desa yang berjauhan mengakibatkan TFL tidak maksimal dalam melaksanakan pendampingan di lapangan.
7. Dalam persyaratan pencairan keuangan untuk PSU, harus di lengkapi dengan sertifikat Uji Kuat Lentur Beton sebagaimana yang telah di tentukan sesuai SK Dirjen Bina Marga, Hal ini sangat sulit dikarenakan terbatasnya Laboratorium yang memiliki Alat Uji Lentur tersebut di Manokwari.
8. Prestasi kerja pembangunan Rumah Khusus (30 unit) dan Rumah Susun Seminari (14 unit) tidak mencapai target 100%.

5.2 LANGKAH KE DEPAN

Sementara langkah kedepan yang dilakuakan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada adalah sebagai berikut:

A. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II

1. Berkoordinasi dengan Bupati setempat untuk mendapatkan lahan yang bisa dihibahkan untuk lokasi kantor Balai.
2. Melaksanakan kegiatan seefektif dan seefisien mungkin dengan dana yang tersedia dan dilaksanakan dengan *full daring.*
3. Mengusulkan penambahan pegawai ke Sesditjen Penyediaan Perumahan terkait kekurangan Sumber Daya Manusia berupa tenaga non teknis khususnya di bagian keuangan.
4. Mengusulkan Anggaran untuk percepatan pelaksanaan serah terima aset BMN satker dan BMN ex-Bangrum dan pencanangan kawasan Zona Integritas WBK/WBBM.

5. Pihak Balai pro aktif kepada instansi/ pengusul aspiratif untuk segera melengkapi berkas administrasi usulan pembangunan bantuan perumahan yang lengkap.

B. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat

1. Untuk perbaikan usulan selanjutnya agar Pemda benar-benar menyiapkan lahan siap bangun.
2. Sebisa mungkin dilakukan pelelangan dini untuk mengejar waktu pelaksanaan pembangunan fisik.
3. Mengusulkan anggaran tambahan untuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ke lokasi pekerjaan yang terpencil.
4. Diharapkan adanya *sharing* dana dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat penerima bantuan dalam bentuk uang, tenaga maupun material.
5. Kementerian/Lembaga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat agar data Calon Penerima Bantuan sesuai dengan data e-RTLH dari Kabupaten/Kota.
6. Perekrutan TFL lebih memprioritaskan TFL yang berdomisili di wilayah dampingannya sehingga tidak membutuhkan biaya mobilisasi yang besar.
7. Uji kuat lentur beton dilaksanakan sebelum pelaksanaan fisik di lapangan agar kualitas beton yang diinginkan dapat tercapai sesuai mutu yang disyaratkan.
8. Melakukan monitoring/pengawasan secara rutin maksimal 1 minggu sekali agar pekerjaan bisa selesai sesuai jadwal perpanjangan waktu yang diberikan.

Demikian Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun Anggaran 2022 disusun, untuk memberikan informasi yang dapat digunakan dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengembangan kebijakan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan.

LAMPIRAN

- PERJANJIAN KINERJA BP2P PAPUA II TA2022
- PERJANJIAN KINERJA REVISI BP2P PAPUA II TA 2022
- DOKUMENTASI KEGIATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yance Pabisa**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Iwan Suprijanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Iwan Suprijanto	**Yance Pabisa**
NIP. 19710930 199803 1 001	NIP. 19650412 199703 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1 Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan	4 Laporan
	2 Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	1,338 Unit
	3 Jumlah Rumah Susun yang dibangun	102 Unit
	4 Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	1 Tower
	5 Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	30 Unit
	6 Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	100 Unit
2 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	2 Layanan
	2 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	2 Layanan
	3 Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layanan

Kegiatan:		Anggaran
1. Penyediaan Akses Perumahan Layak dan Aman	**Rp**	**45,544,005,000**
2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	**Rp**	**5,546,442,000**
	Total Rp	**51,090,447,000**

Jakarta, Januari 2022

Direktur Jenderal Perumahan

Iwan Suprijanto

NIP. 19710930 199803 1 001

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II

Yance Pabisa

NIP. 19650412 199703 1 009

REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yance Pabisa**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Iwan Suprijanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua

Iwan Suprijanto
NIP. 19710930 199803 1 001

Pihak Pertama

Yance Pabisa
NIP. 19650412 199703 1 009

REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1 Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	5 Laporan
	2 Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	1.338 Unit
	3 Jumlah Rumah Susun yang dibangun	102 Unit
	4 Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	1 Tower
	5 Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	30 Unit
	6 Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	- Unit
	7 Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	50 Unit
2 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1 Jumlah Lavanan Sarana dan Prasarana Internal	2 Lavanan
	2 Jumlah Lavanan Dukungan Manajemen Satker	2 Lavanan
	3 Jumlah Lavanan Perkantoran	2 Lavanan

Kegiatan:

		Anggaran
1. Penyediaan Akses Perumahan Layak dan Aman	**Rp**	**106.542.207.000**
a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II	Rp	1.694.128.000
b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat	Rp	104.848.079.000
2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	**Rp**	**4.026.736.000**
a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II	Rp	3.146.803.000
b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat	Rp	879.933.000
Pagu Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II	**Rp**	**4.840.931.000**
Pagu Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat	**Rp**	**105.728.012.000**
Total	**Rp**	**110.568.943.000**

Jakarta, Desember 2022

Direktur Jenderal Perumahan

Iwan Suprijanto
NIP. 19710930 199803 1 001

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II

Yande Pabisa
NIP. 19650412 199703 1 009

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:0728-3917-9117-0500

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420161/2022

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(07)	Ditjen Perumahan
3. Provinsi	:	(33)	PAPUA BARAT
4. Kode/Nama Satker	:	(420161)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II
Sebesar	:	Rp. 5.546.442.000	(LIMA MILIAR LIMA RATUS EMPAT PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	5.546.442.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MANOKWARI (065) Rp. 5.546.442.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2022

DS:0728-3917-9117-0500

Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	5.546.442.000
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Rp.	3.554.101.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	1.992.341.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2022

DS:0728-3917-9117-0500

Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	1.992.341.000
IA.4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	Rp.	1.992.341.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.554.101.000
WA.5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	Rp.	3.554.101.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2022
I A. INFORMASI KINERJA

DS:0728-3917-9117-0500

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (07) Ditjen Perumahan
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode/Nama Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

Program	:	033.07.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.992.341.000
Kegiatan	:	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni				1.992.341.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Ketersediaan Rumah Layak dan Aman				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4978.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	2,00	Rekomendasi Kebijakan		1.992.341.000
Rincian Output	:	01 ABF.009	Strategi dan Program Prioritas Tahunan Bidang Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan		1.902.341.000
		02 ABF.021	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial	1.00	Rekomendasi Kebijakan		90.000.000
Program	:	033.07.WA	Program Dukungan Manajemen				3.554.101.000
Kegiatan	:	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan				3.554.101.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Presentase efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5578.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan		3.454.101.000
Rincian Output	:	01 EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan		550.000.000
		02 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan		2.904.101.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5578.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00	Unit		100.000.000
Rincian Output	:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.00	Unit		100.000.000

Jakarta, 17 November 2021
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Mohammad Zainal Fatah
NIP 196611021199603100 1

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:8735-4900-8027-5934

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420161/2022

Revisi ke 01
Tanggal : 25 April 2022

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(07)	Ditjen Perumahan
3. Provinsi	:	(33)	PAPUA BARAT
4. Kode/Nama Satker	:	(420161)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II
Sebesar	:	Rp. 5.291.776.000	(LIMA MILIAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	5.291.776.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MANOKWARI (065) Rp. 5.291.776.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2022

DS:8735-4900-8027-5934

Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	5.291.776.000
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Rp.	3.243.177.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	2.048.599.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2022

DS:8735-4900-8027-5934

Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	2.048.599.000
IA.4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	Rp.	2.048.599.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.243.177.000
WA.5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	Rp.	3.243.177.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2022
I A. INFORMASI KINERJA

DS:8735-4900-8027-5934

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (07) Ditjen Perumahan
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode/Nama Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

Program	:	033.07.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				2.048.599.000
Kegiatan	:	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni				2.048.599.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Ketersediaan Rumah Layak dan Aman				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4978.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	2,00	Rekomendasi Kebijakan		1.798.599.000
Rincian Output	:	01 ABF.009	Strategi dan Program Prioritas Tahunan Bidang Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan		1.678.599.000
		02 ABF.021	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial	1.00	Rekomendasi Kebijakan		120.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4978.CDB	OM Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	0,00	unit		250.000.000
Rincian Output	:	01 CDB.004	Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama	0.00	unit		250.000.000
Program	:	033.07.WA	Program Dukungan Manajemen				3.243.177.000
Kegiatan	:	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan				3.243.177.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Presentase efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5578.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan		3.151.925.000
Rincian Output	:	01 EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan		501.884.000
		02 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan		2.650.041.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5578.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00	Unit		91.252.000
Rincian Output	:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.00	Unit		91.252.000

Jakarta, 17 November 2021
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Mohammad Zainal Fatah
NIP 196611021199603100 1

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:8735-4900-8027-5934

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420161/2022

Revisi ke 02
Tanggal : 28 Juni 2022

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(07)	Ditjen Perumahan
3. Provinsi	:	(33)	PAPUA BARAT
4. Kode/Nama Satker	:	(420161)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II
Sebesar	:	Rp. 5.291.776.000	(LIMA MILIAR DUA RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	5.291.776.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MANOKWARI (065) Rp. 5.291.776.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2022

DS:8735-4900-8027-5934

Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	5.291.776.000
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Rp.	3.243.177.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	2.048.599.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2022

DS:8735-4900-8027-5934

Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	2.048.599.000
IA.4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	Rp.	2.048.599.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.243.177.000
WA.5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	Rp.	3.243.177.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2022
I A. INFORMASI KINERJA

DS:8735-4900-8027-5934

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (07) Ditjen Perumahan
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode/Nama Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

Program	:	033.07.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				2.048.599.000
Kegiatan	:	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni				2.048.599.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Ketersediaan Rumah Layak dan Aman				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4978.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	2,00	Rekomendasi Kebijakan		1.798.599.000
Rincian Output	:	01 ABF.009	Strategi dan Program Prioritas Tahunan Bidang Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan		1.678.599.000
		02 ABF.021	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial	1.00	Rekomendasi Kebijakan		120.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4978.CDB	OM Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	0,00	unit		250.000.000
Rincian Output	:	01 CDB.004	Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama	0.00	unit		250.000.000
Program	:	033.07.WA	Program Dukungan Manajemen				3.243.177.000
Kegiatan	:	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan				3.243.177.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Presentase efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5578.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan		3.151.925.000
Rincian Output	:	01 EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan		501.884.000
		02 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan		2.650.041.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5578.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00	Unit		91.252.000
Rincian Output	:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.00	Unit		91.252.000

Jakarta, 17 November 2021
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Mohammad Zainal Fatah
NIP 196611021199603100 1

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:5105-3920-0595-9269

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420161/2022

Revisi ke 03
Tanggal : 21 Agustus 2022

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(07)	Ditjen Perumahan
3. Provinsi	:	(33)	PAPUA BARAT
4. Kode/Nama Satker	:	(420161)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II
Sebesar	:	Rp. 5.085.972.000	(LIMA MILIAR DELAPAN PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	5.085.972.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MANOKWARI (065) Rp. 5.085.972.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2022

DS:5105-3920-0595-9269

Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	5.085.972.000
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Rp.	3.037.373.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	2.048.599.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2022

DS:5105-3920-0595-9269

Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	2.048.599.000
IA.4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	Rp.	2.048.599.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.037.373.000
WA.5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	Rp.	3.037.373.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2022
I A. INFORMASI KINERJA

DS:5105-3920-0595-9269

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (07) Ditjen Perumahan
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode/Nama Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

Program	:	033.07.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				2.048.599.000
Kegiatan	:	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni				2.048.599.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Ketersediaan Rumah Layak dan Aman				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4978.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	2,00	Rekomendasi Kebijakan		1.798.599.000
Rincian Output	:	01 ABF.009	Strategi dan Program Prioritas Tahunan Bidang Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan		1.678.599.000
		02 ABF.021	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial	1.00	Rekomendasi Kebijakan		120.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4978.CDB	OM Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	0,00	unit		250.000.000
Rincian Output	:	01 CDB.004	Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama	0.00	unit		250.000.000
Program	:	033.07.WA	Program Dukungan Manajemen				3.037.373.000
Kegiatan	:	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan				3.037.373.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Presentase efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5578.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan		2.596.121.000
Rincian Output	:	01 EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan		501.884.000
		02 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan		2.094.237.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5578.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00	Unit		441.252.000
Rincian Output	:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.00	Unit		441.252.000

Jakarta, 17 November 2021
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Mohammad Zainal Fatah
NIP 196611021199603100 1

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:7909-1302-5705-0265

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420161/2022

Revisi ke 04
Tanggal : 02 November 2022

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(07)	Ditjen Perumahan
3. Provinsi	:	(33)	PAPUA BARAT
4. Kode/Nama Satker	:	(420161)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II
Sebesar	:	Rp. 4.905.101.000	(EMPAT MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA JUTA SERATUS SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	4.905.101.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MANOKWARI (065) Rp. 4.905.101.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2022

DS:7909-1302-5705-0265

Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	4.905.101.000
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Rp.	3.210.973.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	1.694.128.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2022

DS:7909-1302-5705-0265

Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	1.694.128.000
IA.4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	Rp.	1.694.128.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.210.973.000
WA.5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	Rp.	3.210.973.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2022
I A. INFORMASI KINERJA

DS:7909-1302-5705-0265

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (07) Ditjen Perumahan
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode/Nama Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

Program	:	033.07.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.694.128.000
Kegiatan	:	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni				1.694.128.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Ketersediaan Rumah Layak dan Aman				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4978.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	2,00	Rekomendasi Kebijakan		1.300.128.000
Rincian Output	:	01 ABF.009	Strategi dan Program Prioritas Tahunan Bidang Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan		1.080.128.000
		02 ABF.021	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial	1.00	Rekomendasi Kebijakan		220.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4978.CDB	OM Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	0,00	unit		394.000.000
Rincian Output	:	01 CDB.004	Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama	0.00	unit		394.000.000
Program	:	033.07.WA	Program Dukungan Manajemen				3.210.973.000
Kegiatan	:	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan				3.210.973.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Presentase efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5578.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan		2.769.721.000
Rincian Output	:	01 EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan		797.884.000
		02 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan		1.971.837.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5578.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00	Unit		441.252.000
Rincian Output	:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.00	Unit		441.252.000

Jakarta, 17 November 2021
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Mohammad Zainal Fatah
NIP 196611021199603100 1

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:7909-1302-5705-0265

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420161/2022

Revisi ke 05
Tanggal : 14 November 2022

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(07)	Ditjen Perumahan
3. Provinsi	:	(33)	PAPUA BARAT
4. Kode/Nama Satker	:	(420161)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II
Sebesar	:	Rp. 4.905.101.000	(EMPAT MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA JUTA SERATUS SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	4.905.101.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MANOKWARI (065) Rp. 4.905.101.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2022

DS:7909-1302-5705-0265

Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	4.905.101.000
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Rp.	3.210.973.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	1.694.128.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2022

DS:7909-1302-5705-0265

Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	1.694.128.000
IA.4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	Rp.	1.694.128.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.210.973.000
WA.5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	Rp.	3.210.973.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2022
I A. INFORMASI KINERJA

DS:7909-1302-5705-0265

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (07) Ditjen Perumahan
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode/Nama Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

Program	:	033.07.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.694.128.000
Kegiatan	:	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni				1.694.128.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Ketersediaan Rumah Layak dan Aman				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4978.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	2,00	Rekomendasi Kebijakan		1.300.128.000
Rincian Output	:	01 ABF.009	Strategi dan Program Prioritas Tahunan Bidang Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan		1.080.128.000
		02 ABF.021	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial	1.00	Rekomendasi Kebijakan		220.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4978.CDB	OM Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	0,00	unit		394.000.000
Rincian Output	:	01 CDB.004	Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama	0.00	unit		394.000.000
Program	:	033.07.WA	Program Dukungan Manajemen				3.210.973.000
Kegiatan	:	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan				3.210.973.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Presentase efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5578.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan		2.769.721.000
Rincian Output	:	01 EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan		797.884.000
		02 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan		1.971.837.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5578.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00	Unit		441.252.000
Rincian Output	:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.00	Unit		441.252.000

Jakarta, 17 November 2021
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Mohammad Zainal Fatah
NIP 196611021199603100 1

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

DS:4076-4824-2786-5020

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420161/2022

Revisi ke 06
Tanggal : 08 Desember 2022

A. Dasar Hukum:

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 6 Tahun 2021 tentang APBN TA 2022

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(033)	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
2. Unit Organisasi	:	(07)	Ditjen Perumahan
3. Provinsi	:	(33)	PAPUA BARAT
4. Kode/Nama Satker	:	(420161)	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II
Sebesar	:	Rp. 4.840.931.000	(EMPAT MILIAR DELAPAN RATUS EMPAT PULUH JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	4.840.931.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN MANOKWARI (065) Rp. 4.840.931.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2022

DS:4076-4824-2786-5020

Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	4.840.931.000
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Rp.	3.146.803.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	1.694.128.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2022

DS:4076-4824-2786-5020

Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	1.694.128.000
IA.4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	Rp.	1.694.128.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.146.803.000
WA.5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	Rp.	3.146.803.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2022
I A. INFORMASI KINERJA

DS:4076-4824-2786-5020

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (07) Ditjen Perumahan
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode/Nama Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

Program	:	033.07.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				1.694.128.000
Kegiatan	:	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni				1.694.128.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Ketersediaan Rumah Layak dan Aman				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	4978.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	2,00	Rekomendasi Kebijakan		1.300.128.000
Rincian Output	:	01 ABF.009	Strategi dan Program Prioritas Tahunan Bidang Perumahan	1.00	Rekomendasi Kebijakan		1.080.128.000
		02 ABF.021	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial	1.00	Rekomendasi Kebijakan		220.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4978.CDB	OM Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	0,00	unit		394.000.000
Rincian Output	:	01 CDB.004	Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama	0.00	unit		394.000.000
Program	:	033.07.WA	Program Dukungan Manajemen				3.146.803.000
Kegiatan	:	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan				3.146.803.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Presentase efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5578.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan		2.705.551.000
Rincian Output	:	01 EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan		797.884.000
		02 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan		1.907.667.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5578.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00	Unit		441.252.000
Rincian Output	:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.00	Unit		441.252.000

Jakarta, 17 November 2021
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.

Mohammad Zainal Fatah
NIP 196611021199603100 1

DOKUMENTASI KEGIATAN

Rapat koordinasi Pokja PKP Ppaua Barat

DOKUMENTASI KEGIATAN

Rapat sosialisasi penyelenggarann SPIP dan Manajemen Risiko

DOKUMENTASI KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pembangunan BSPS di Papua Barat

DOKUMENTASI KEGIATAN

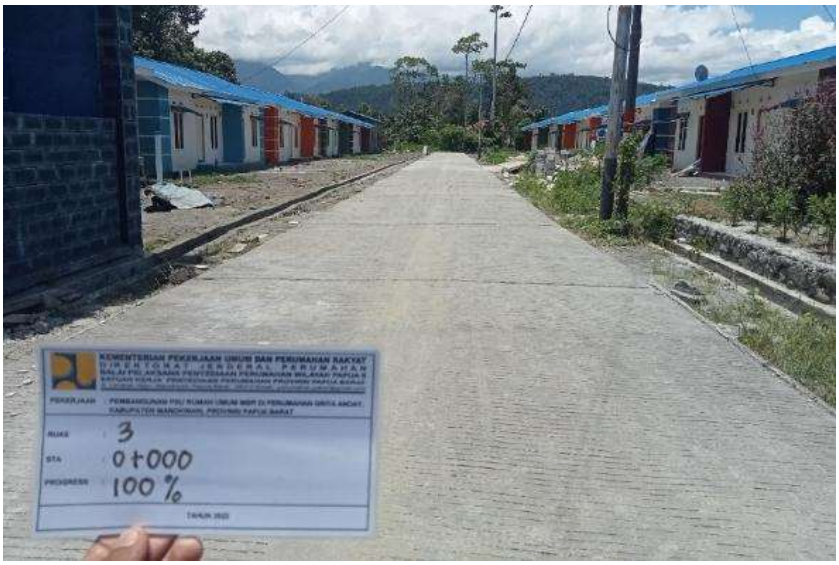

Pelaksanaan kegiatan pembangunan PSU di Papua Barat

DOKUMENTASI KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Rumah Susun

DOKUMENTASI KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Rumah Khusus